

ANALISIS PENYALAHGUNAAN ATRIBUT TNI DALAM BERBAGAI TINDAK PIDANA DI INDONESIA

(Studi Kasus Pada Kebijakan Distribusi Logistik TNI)

INTISARI

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan dan menganalisis fenomena penyalahgunaan atribut TNI dalam berbagai tindak pidana di Indonesia. Dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, penelitian ini mengungkap bagaimana atribut TNI digunakan dalam konteks kejahatan dan memberikan pemahaman mendalam terkait dampak serta peran atribut TNI dalam tindak pidana yang beragam. Penelitian dilaksanakan di Magelang selama satu bulan, Oktober hingga November 2023, dengan fokus pada implementasi kebijakan administrasi logistik TNI AD. Teknik purposive sampling digunakan untuk memilih informan yang terkait dengan distribusi seragam dan atribut TNI, termasuk personel TNI AD, pihak yang bertanggung jawab atas pengamanan, dan supplier atribut militer di wilayah Magelang.

Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi. Hasil observasi mengungkap kelemahan dalam manajemen distribusi logistik, seperti keterbatasan teknologi, kurangnya koordinasi antar unit, dan manajemen risiko yang perlu ditingkatkan. Teori kebijakan publik Friedrich, semiotika Charles Kelly Bartles, dan konsepsi citra oleh Lomsky-Feder dan Ben-Ari digunakan untuk menganalisis dinamika distribusi logistik TNI. Rekomendasi melibatkan peningkatan pengawasan internal, pelibatan masyarakat, dan pengembangan hukum positif yang tegas.

Temuan penelitian ini menyoroti pentingnya perbaikan operasional, peningkatan koordinasi, penerapan teknologi, dan komunikasi efektif dalam menjaga integritas, keamanan, dan ketersediaan atribut TNI. Saran yang diajukan mencakup penguatan pengawasan internal, pelibatan masyarakat, dan pengembangan hukum positif yang tegas. Kolaborasi yang erat antara TNI AD dan pemerintah diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan sadar akan konsekuensi hukum terkait penyalahgunaan atribut TNI. Penelitian ini diharapkan memberikan wawasan berharga untuk pencegahan dan penanganan penyalahgunaan atribut TNI di Indonesia serta menyumbang pada pemahaman lebih mendalam tentang implementasi kebijakan distribusi logistik.

Kata kunci: penyalahgunaan atribut TNI, distribusi logistik, implementasi kebijakan, Akademi Militer, Magelang, kualitatif.

ANALYSIS OF THE MISUSE OF TNI ATTRIBUTES IN VARIOUS CRIMES IN INDONESIA

(A Case Study on the Distribution Policy of TNI Logistics)

ABSTRACT

This research aims to describe and analyze the phenomenon of the misuse of TNI (Indonesian National Armed Forces) attributes in various criminal activities in Indonesia. Utilizing a qualitative descriptive method, the study reveals how TNI attributes are employed in the context of crimes and provides an in-depth understanding of the impacts and roles of TNI attributes in diverse criminal acts. The research is conducted in Magelang over one month, from October to November 2023, with a focus on the implementation of logistics administration policies by the TNI AD (Army). Purposive sampling technique is employed to select informants related to the distribution of uniforms and TNI attributes, including TNI AD personnel, those responsible for security, and military attribute suppliers in the Magelang region.

Data is collected through in-depth interviews, participatory observation, and documentary studies. The observational findings reveal weaknesses in logistics distribution Management, such as technological limitations, lack of coordination among units, and the need for improved risk Management. The public policy theory by Friedrich, semiotics by Charles Kelly Bartles, and image conception by Lomsky-Feder and Ben-Ari are utilized to analyze the dynamics of TNI logistics distribution. Recommendations involve enhancing internal supervision, engaging the public, and developing clear and stringent legal regulations.

The research findings emphasize the importance of operational improvements, increased coordination, technology implementation, and effective communication to maintain the integrity, security, and availability of TNI attributes. Proposed suggestions include strengthening internal oversight, involving the community, and developing robust legal frameworks. Close collaboration between TNI AD and the government is essential to create a safer environment and increase awareness of legal consequences related to the misuse of TNI attributes. This research is expected to provide valuable insights for preventing and addressing the misuse of TNI attributes in Indonesia and contribute to a deeper understanding of the implementation of logistics distribution policies.

Keywords: misuse of TNI attributes, logistics distribution, policy implementation, Military Academy, Magelang, qualitative.